



## REFORMASI EKONOMI ARAB SAUDI

Sita Hidriyah\*)

### Abstrak

*Kabinet Arab Saudi meloloskan reformasi ekonomi menyeluruh yang bertujuan mengalihkan ketergantungan negara dari pendapatan minyak. Ketergantungan pemerintah terhadap hasil minyak dirasa telah membahayakan negara. Wakil putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang juga ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan "Visi Arab Saudi untuk 2030" yang menargetkan negara itu menjadi satu dari 15 negara dengan perekonomian terbesar dunia dan memastikan Arab Saudi dapat melepaskan ketergantungannya pada minyak pada tahun 2020. Rencana ini merupakan upaya yang ambisius dan tidak mudah diraih karena beragam tantangan yang akan dihadapi. Beberapa langkah yang disusun Arab Saudi untuk mencapai tujuan tersebut dapat menjadi contoh pelajaran dan juga membuka peluang kerjasama bagi Indonesia.*

### Pendahuluan

Harga minyak terus mengalami penurunan sejak bulan Juni 2014. Kejadian ini membuat Arab Saudi menghadapi kenyataan untuk perlu melakukan diversifikasi dan reformasi di bidang ekonomi. Beberapa negara anggota organisasi Negara Pengekspor Minyak atau *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) menyerukan pertemuan darurat untuk membahas soal ini, tetapi Arab Saudi menepis keinginan itu dan memproduksi minyak mentah.

Penurunan harga terus berdampak terhadap ekonomi negara yang mengandalkan minyak bumi tersebut. Pada akhirnya negara mengumumkan kebijakan ekonomi pada Senin, 25 April 2016. Kerajaan Arab Saudi menargetkan di tahun 2030 mendatang tidak lagi bergantung pada

bahan bakar fosil yang dapat habis dan memiliki harga fluktuatif. Banyak pihak menyebut, rencana reformasi Arab Saudi sebagai langkah berani dan ambisius. Pasca anjloknya harga minyak sejak pertengahan 2014, *reshuffle* atau perombakan kabinet dilakukan. Upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi adalah semata-mata untuk menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan generasi mendatang. Perubahan yang ingin dilakukan secara langsung tidak hanya akan berdampak pada sektor ekonomi saja, tetapi meluas kepada sektor sosial, pendidikan, serta budaya. Reformasi ekonomi Arab Saudi memungkinkan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, untuk turut mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan mempersiapkan diri agar tidak bergantung lagi pada minyak bumi.

\*) Peneliti pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
E-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id



## Minyak sebagai Sumber Utama Pemasukan Negara

Arab Saudi sangat bergantung pada hasil minyak bumi sebagai sumber pemasukan negara. Ketergantungan tersebut terjadi sejak sumber minyak ditemukan pada 3 Maret 1938. Sektor minyak menyumbang 70% pendapatan negara yang memiliki cadangan minyak sebesar 268 miliar barel (Gbbbl) atau yang terbesar di dunia. Sayangnya, kejayaan minyak yang telah mengangkat ekonomi kerajaan itu belakangan mulai surut sehingga mereka mengalami defisit besar-besaran. Saat ini, harga minyak dunia dijual pada kisaran US\$40 per barel. Padahal, di awal 2014 harga minyak masih US\$100 per barel. Akibatnya, Arab Saudi mengalami defisit anggaran sebesar US\$100 miliar pada 2015.

Sejak tahun 2014, Saudi memimpin OPEC untuk menggunakan strategi dengan cara mempertahankan pangsa pasar daripada mengurangi produksi guna mendukung harga minyak di pasar global. Arab Saudi percaya harga minyak mentah dapat menciptakan keseimbangan di pasar. Hal ini diyakini akan mampu mendorong kenaikan harga minyak. Awal bulan Mei 2016 ini, Saudi melakukan pinjaman melalui konsorsium bank internasional sebesar US\$10 miliar dengan tenor 5 tahun.

Di samping persoalan defisit akibat penurunan harga minyak tersebut, negeri petrodolar itu dihadapkan pada berbagai persoalan seperti kebutuhan perumahan yang layak dan jumlah pengangguran yang besar, serta besarnya subsidi. Hampir separuh penduduk kerajaan itu kini berusia di bawah 25 tahun dan jutaan penduduk mencari pekerjaan. Melihat pada apa yang sedang dialami negara Arab Saudi, tidaklah mustahil jika negara tersebut nantinya akan meminjam uang kepada sejumlah bank ataupun lembaga keuangan internasional. Apabila benar terjadi, peminjaman uang memberi sinyal bahwa kerajaan itu sedang mencari cara untuk menjalankan ekonominya setelah anjloknya harga minyak.

## Reformasi Ekonomi Arab Saudi

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bertekad melepaskan ketergantungan ekonominya dari minyak. Untuk mengatasi penurunan pendapatan dari harga minyak

ini, kabinet Arab Saudi telah meloloskan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Reformasi itu diberi nama Visi Saudi 2030. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam Visi Arab Saudi 2030 yang disusun Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang diketuai Pangeran Mohammed bin Salman. Visi itu telah disetujui oleh sidang dewan kabinet Arab Saudi pada Senin, 25 April 2016 di Riyadh.

Visi Saudi 2030 menetapkan tujuan untuk 15 tahun ke depan beserta agenda kebijakan yang dikenal sebagai Rencana Transformasi Nasional. Menurut visi itu, Arab Saudi diarahkan untuk melepaskan ketergantungannya pada minyak di tahun 2020. Berdasarkan program itu, pada 2030, ekspor nonminyak diharapkan meningkat 50% atau enam kali lipat dari US\$43,5 miliar menjadi US\$267 miliar melalui pemangkasan penggunaan energi dan subsidi. Langkah reformasi itu juga dilakukan untuk menjadikan Saudi sebagai negara 15 terkaya di dunia setelah kini di peringkat 19. Keterbukaan itu ditandai dengan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) kurang dari 5% saham perusahaan minyak terbesar di dunia *Arabian American Oil Company* (Aramco). Melalui IPO, pemerintah Saudi berharap menggalang dana senilai US\$2 triliun-US\$2,5 triliun atau nilai terbesar IPO di dunia.

Peluncuran Visi Saudi 2030 merupakan rencana ambisius kerajaan untuk mengubah perekonomian dari ketergantungan minyak bumi yang dinikmati rakyat selama ini. Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) menilai rencana ini merupakan upaya ambisius dan tidak mudah diraih. Oleh karenanya, IMF turut memperingatkan Arab Saudi akan beragam tantangan yang akan dihadapi. Sebagai pengalihan dari sektor minyak, perhatian diutamakan kepada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih penting.

Kerajaan Arab Saudi sedang bekerja keras menyambut negara era pasca minyak dan mempersiapkan *roadmap* yang lebih jelas untuk masa depan negara. Persiapan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak diiringi upaya Saudi menggenjot diversifikasi pendapatan negara. *Roadmap*

baru ini diyakini berdampak besar bagi perubahan masyarakat Arab Saudi pada era modern, tak terkecuali perubahan sosial, politik, dan militer. Masyarakat Saudi kini harus mempersiapkan transformasi yang akan mengurangi jatah kenyamanan mereka selama ini. Banyak fasilitas dari negara yang dipangkas akibat turunnya harga minyak dunia.

Meski punya cadangan minyak terbesar di dunia hingga 267 miliar barel, situasi menurunnya harga minyak karena pelemahan ekonomi dunia menjadikan anggaran Saudi defisit 87 miliar dolar AS. Cadangan devisa merosot dari 746 miliar AS pada 2014 menjadi 616 miliar dolar saat ini. Sementara, harga minyak bumi diprediksi terus rendah setidaknya hingga setahun ini. Kejadian ini memicu Pemerintah Saudi melakukan upaya penyelamatan ekonomi negara. Seperti, kebijakan kenaikan harga BBM hingga 40 persen di seluruh kerajaan yang diberlakukan sejak 11 Januari 2016. Hal ini belum ditambah rencana Kementerian Keuangan yang akan mengurangi subsidi untuk air, listrik, dan produk minyak bumi selama lima tahun ke depan.

Satu hal lain yang juga baru dilakukan Arab Saudi adalah menetapkan Khalid al-Falih, pemimpin utama Aramco, menjadi menteri energi Arab Saudi yang baru. Terpilihnya Falih karena pengalamannya di bidang industri, energi dan kelistrikan. Penggantian posisi menteri semakin memastikan berlanjutnya kebijakan terkait minyak. Falih menyatakan akan mempertahankan kebijakan yang telah ditentukan, mempertahankan peran Arab Saudi di pasar energi internasional, serta memperkuat posisi sebagai pemasok paling dipercaya di bidang energi. Falih memang bersikeras dengan pandangannya bahwa pasar dapat diseimbangkan dengan harga yang murah. Hal ini cukup menandakan bahwa Falih dan Arab Saudi cukup nyaman dengan kebijakannya saat ini.

## **Pelajaran dan Peluang Kerja Sama bagi Indonesia**

Indonesia merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Secara historis dan religius, hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi setidaknya dilandasi oleh berbagai

persamaan kepentingan dan budaya. Dalam beberapa kasus, Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum-forum internasional. Dalam perjalanannya, hubungan baik Indonesia Arab Saudi terjalin semakin erat yang kini diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Walau sempat mengalami pasang surut, secara umum hubungan bilateral ini terus membaik.

Dampak dari reformasi ekonomi Arab Saudi memang tidak tampak secara langsung bagi Indonesia. Namun, Indonesia dan Arab Saudi merupakan negara yang sama-sama mengembangkan sumber EBT. Pembangunan EBT sudah menjadi pilihan berbagai negara dunia, tidak terkecuali Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi memiliki cadangan minyak yang berlimpah, namun Arab Saudi pun sedang mengembangkan EBT dari panas bumi atau geothermal. EBT di Indonesia juga terus dikembangkan serta dioptimalkan. Sebagai contoh proyek infrastruktur listrik EBT di Indonesia Timur di Morotai, Maluku Utara pada 5 April 2016. Hal ini mutlak dilakukan karena Indonesia tidak dapat terus mengandalkan sumber-sumber energi dari fosil apalagi semua sumber EBT ada di Indonesia. Dengan adanya sumber yang melimpah, sebenarnya Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman krisis energi, tetapi ketergantungan memang perlu diminimalisir sehingga pemberdayaan energi dapat dilakukan sekaligus untuk memperhatikan generasi mendatang.

Negara harus memiliki peran krusial dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan energi. Pengurangan ketergantungan kepada minyak mentah menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi mitra dalam soal EBT. Indonesia dapat mencontoh Arab Saudi yang dalam fase reformasi baru melepaskan ketergantungan akan minyak walaupun Arab Saudi merupakan salah satu yang mempunyai sumber minyak terbesar. Meski tercatat produksi minyak Saudi mencapai 12 juta barel per hari, namun mereka sudah mulai berpikir ke depan dengan melepaskan ketergantungan dan bergeser kepada EBT. Langkah Arab Saudi terlihat sedikit berbeda dengan Indonesia, yang keinginannya untuk membangun EBT masih belum maksimal. Padahal, produksi

minyak di Indonesia hanya 800 ribu barel per hari atau separuh dari kebutuhan minyak per harinya yang mencapai 1,5 juta barel per hari.

Keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bukanlah bermaksud untuk menyingkirkan peran sumber yang sudah dipakai, tetapi EBT akan pula menjadi pertaruhan Indonesia ke depan. Arab Saudi dapat saja menjadi mitra Indonesia untuk diversifikasi energi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Arab Saudi sudah menganggarkan USD2 triliun untuk investasi di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia melalui investasi kilang dan *storage*. Mereka akan menghabiskan minimal USD2 triliun untuk investasi internasional dan Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi serta menjadi mitra mereka untuk diversifikasi energi. Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat menerapkan semua keinginan tersebut secara fokus dan matang. Selain itu, Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap rencana masuk akal sehingga tujuan ambisius dapat tercapai dalam bentuk perubahan.

## Penutup

Arab Saudi memilih untuk mengubah perekonomian menjadi jauh dari ketergantungan minyak bumi. Arab Saudi kini menyadari jika SDA bukanlah segalanya. Perhatian kepada kualitas SDM lebih penting. Selama ini, konsep negara yang lama dalam budaya Arab telah menciptakan hambatan untuk kemajuan negara seperti pengangguran. Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman kini menuju irama baru. Hal ini berlaku tidak hanya di kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, tetapi juga dalam ambisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang diharapkan menjadi realitas positif.

Reformasi yang dilakukan Arab Saudi dapat memicu Indonesia untuk terus mengembangkan EBT. Kebijakan yang diambil Arab Saudi dapat membuat Indonesia tidak kalah untuk tidak tergantung terhadap energi fosil lagi. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia lewat program-program kementerian terkait sebagai wujud komitmen realisasi sumber EBT. Pengembangan EBT tidak

akan berkembang maksimal jika tidak adanya dorongan lebih dari pemerintah. Pemerintah dapat terus mendorong adanya konservasi energi dan mencanangkan upaya pemanfaatan energi secara lebih efisien. Sehingga dengan kebutuhan energi Indonesia yang besar, seharusnya apa yang sedang terjadi pada Arab Saudi dapat memotivasi Indonesia untuk lebih mendorong penggunaan EBT, dan memanfaatkan peluang-peluang kerjasama yang lahir akibat reformasi ekonomi Arab Saudi.

## Referensi

- “Arab Saudi Bakal Tak Andalkan Minyak Untuk Topang Perekonomian”, *Kompas* 26 April 2016.
- “Arab Saudi Setop Kecanduan Minyak, Sudirman Said Lihat Peluang”, <http://ekbis.sindonews.com/read/1104380/34/arab-saudi-setop-kecanduan-minyak-sudirman-said-lihat-peluang-1461732274>, diakses 7 Mei 2016.
- “Arab Saudi: Menteri Energi Baru Jaga Kebijakan Minyak”, *Kompas*, 9 Mei 2016.
- “China, Economy Tests For Taiwan Presidential Winner Tsai”, *The Jakarta Post*, 17 Januari 2016.
- “Empat Tahun Lagi Arab Saudi Ingin Lepas Dari Minyak”, *Kompas* 26 April 2016.
- “Reformasi Arab Saudi: Mencoba Beralih Dari Minyak”, [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160425\\_majalah\\_saudi\\_minyak](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160425_majalah_saudi_minyak), diakses 29 April 2016.
- “Saudi Berhenti Mencandu Minyak”, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/43508/saudi-berhenti-mencandu-minyak/2016-05-03>, diakses 7 Mei 2016.
- “Transformasi Kerajaan Era Raja Salman”, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/29/06dy877-transformasi-kerajaan-era-raja-salman>, diakses 7 Mei 2016.
- “Visi Saudi 2030, Haji-Umrah, dan Green Card”, <http://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/16/05/02/06jfg31-visi-saudi-2030-hajiumrah-dan-green-card>, diakses 9 Mei 2016.